

Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

Peringkat Provinsi Dalam Pengembangan Ekspor (Metode *Regional Export Performance Index / REPI*)

Fahrudin Ramly

Determinant of Economic Growth in Maluku Province, periods 1986-2009 : Error Correction Approach

Yerimias Manuhutu

Pengaruh *Locus of Control* terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit dengan Kinerja Auditor sebagai Variabel Mediasi

Maria Hehanusa

Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku

Tedy Christianto Leasiwal

Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

Jeanee B. Nikijuluw

Anomali Hubungan antara Angkatan Kerja dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Jefry Gasperz

Tinjauan Makro Keuangan Indonesia, periode 1998-2008

Desry Jonelda Louhenapessy

Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Skeptisisme Profesional Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit (Survey Persepsi Auditor Inspektorat Kota Ambon)

Ali Amin Kalau

Alternatif Pengendalian Inflasi Melalui Nilai Nilai Kearifan Lokal Maluku

Maryam Sangadji

Pengaruh Bantuan Pemberdayaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat

Ventje Jeffry Kuhuparuw

Pengaruh Dimensi Manajemen Mutu Terpadu Terhadap Perilaku Produktif Karyawan

Zainuddin Latuconsina

John H. K. Wattimena

Analisa Produksi Pala di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah

Sherly Ferdinandus

CE	Vol. VII	No. 2	Halaman 196 - 303	Ambon Desember 2013	ISSN 1978-3612
----	----------	-------	----------------------	------------------------	-------------------

DETERMINAN DAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI PROVINSI MALUKU

**Oleh :
Teddy Christianto Leasiwal**

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Faktor Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif. Analisa kuantitatif digunakan untuk memperoleh faktor determinan dan karakteristik kemiskinan. Periode waktu penelitian antara tahun 2005 hingga 2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan pada provinsi Maluku didominasi oleh penduduk di Pedesaan. Ada 6 (enam) variabel yang signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku yakni Daya Beli Masyarakat, Inflasi, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek huruf, Angka Partisipasi Kasar, Angka Harapan Hidup serta Jumlah Sekolah Menengah Atas. Faktor yang paling dominan diantara keenam variabel tersebut adalah Angka Harapan Hidup.

Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku diantaranya adalah sebagian besar penduduk miskin banyak bekerja pada sektor informal, tingkat pendidikan masih rendah, kondisi perumahan mayoritas terbuat dari dinding papan, lantai dari papan dan tanah, serta atap dari rumbia dan seng. Pembangunan di Maluku harus diprioritaskan dalam hal pembangunan modal manusia seperti kesehatan dengan pendidikan. Dengan tingkat kesehatan yang tinggi maka penduduk akan bisa keluar dari kemiskinannya melalui produktivitas dan kemampuannya dalam berusaha. Jika tingkat kesehatan tersebut dibarengi oleh tingkat pendidikan yang mumpuni maka penduduk selain kuat juga akan pintar sehingga akan lebih mudah untuk keluar dari garis kemiskinan.

Kata kunci : Determinan Kemiskinan, Karakteristik Kemiskinan, Angka Harapan Hidup

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah semua negara atau daerah. Hal ini disebabkan karena kondisi kemiskinan di suatu negara atau daerah merupakan salah satu cerminan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin banyak penduduk miskin di suatu wilayah maka semakin tidak sejahtera wilayah tersebut, sebaliknya semakin sedikit jumlah dan persentase penduduk miskinnya maka hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan penduduknya.

Di Indonesia urusan penanggulangan kemiskinan dijamin secara tegas dalam UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Selain menjadi perhatian pemerintah, kemiskinan juga merupakan permasalahan global yang dihadapi setiap bangsa. Oleh sebab itu banyak negara yang melakukan berbagai upaya agar permasalahan kemiskinan di negaranya dapat dituntaskan. Secara global berbagai upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi agenda penting pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu komitmen yang dilakukan oleh berbagai negara untuk menanggulangi kemiskinan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2000 di New York, Amerika Serikat Menurut Tambunan (2009) Dengan kepercayaan yang penuh bahwa akan ada efek “cucuran ke bawah”, strategi pembangunan di Indonesia pada awal masa orde baru dilaksanakan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan sosial dan politik. Sehingga pemerintah hanya memusatkan pembangunan di sektor-sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak berjalan sempurna karena pengangguran masih tinggi, kemiskinan masih tinggi dan ada indikasi melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan.

Berbeda dengan Strategi pembangunan di Indonesia pada awal masa orde baru yang dilaksanakan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun di Era sekarang ini khususnya semenjak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pilar/agenda pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah dituangkan dalam bentuk *Triple Track Strategy*.

Triple Track Strategy merupakan wujud dari *concern* dan kepedulian pemerintah terhadap pengentasan serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Karena pemerintah menyadari bahwa dalam pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran bukan hanya anggaran besar yang diperlukan tetapi juga harus dilakukan dengan upaya, strategi dan langkah-langkah yang matang agar hasilnya pun memuaskan dan tidak sia-sia. *Triple Track Strategy* tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan dengan mengutamakan ekspor dan investasi (*Pro-growth*), menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja (*Pro-job*), merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan (*Pro-poor*).

1.2 Masalah Penelitian

Provinsi Maluku merupakan provinsi yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dari dahulu Maluku terkenal dengan rempah-rempah dan hasil laut yang menarik minat dunia internasional. Potensi ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk. Di sisi lain kondisi infrastruktur belum merata sehingga menjadi kendala bagi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk tersebut . Apalagi dengan kondisi Maluku yang secara

geografis merupakan daerah kepulauan sehingga mobilitas antar daerah sangat sulit tanpa adanya dukungan infrastruktur. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Faktor apa saja yang menjadi determinan kemiskinan di Provinsi Maluku.
- 2) Di antara berbagai faktor tersebut, faktor apa yang paling dominan atau pengaruhnya paling besar dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku.
- 3) Bagaimana kondisi dan Karakteristik kemiskinan di Maluku serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengentaskannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui faktor apa saja yang menjadi determinan kemiskinan di Provinsi Maluku selama periode tahun 2005-2011.
- 2) Mengetahui faktor apa yang paling dominan atau pengaruhnya paling besar dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku selama periode tahun 2005-2011.
- 3) Mengetahui kondisi dan karakteristik kemiskinan di Maluku dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengentaskannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan evaluasi tentang pengentasan kemiskinan di Provinsi Maluku.
- 2) Untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi determinan penyebab kemiskinan di Provinsi Maluku.
- 3) Untuk mengetahui faktor apa yang paling besar pengaruhnya terhadap kemiskinan di Provinsi Maluku
- 4) Untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan di Maluku dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengentaskannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Konsep dan Defenisi Kemiskinan

Di Indonesia, pengertian kemiskinan didasarkan pada pengertian yang ditetapkan berdasarkan kriteria 3 (tiga) institusi (BPS, 2008) yaitu ;

1. Kriteria BPS, kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/ yang layak bagi kehidupan seseorang. Kebutuhan minimal tersebut dinilai dengan menggunakan pendekatan konsumsi kalori sebesar 2100 kilokalori perkapita per hari. Data kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari data susenas dan untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
2. Kriteria BKKBN, kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : Tidak dapat melaksanakan ibadah agamanya, Seluruh anggota

keluarga tidak mampu makan dua kali sehari, Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.

3. Kriteria Bank Dunia, menurut *World Bank Institute*, Kemiskinan merupakan suatu ketidakcukupan/ kekurangan (*deprivation*) akan aset-aset penting dan peluang-peluang di mana setiap manusia berhak memperolehnya. Bank Dunia menetapkan bahwa kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US\$ 1,00 per kapita per hari.

Pendapat lain tentang definisi kemiskinan diantaranya yaitu : Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Atau ada juga yang mengemukakan bahwa *Poverty is pronounced deprivation in well being* dimana kesejahteraan dapat diukur dengan kekayaan yang dimiliki seseorang, kesehatan, gizi, pendidikan, asset, perumahan dan hak-hak tertentu dalam masyarakat seperti kebebasan berbicara.

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi atau Determinan Kemiskinan

Mencari faktor-faktor penyebab atau determinan kemiskinan bukanlah hal yang mudah, terutama karena penyebab dan indikator kemiskinan terkadang memiliki kesamaan. Ada beberapa teori yang membahas mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan, diantaranya adalah sebagai berikut (disarikan dari Kharisma, 2007) :

1. Teori dari *Maxwell School of Syracuse University*

Teori *Maxwell school* menyatakan bahwa teori penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teori individual dan teori agregat. Teori individual secara rinci menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh individu orang miskin. Beberapa penyebab individual tersebut diantaranya adalah level pendidikan dan keterampilan, kesehatan, *disability* dan usia, orientasi kerja dan budaya kemiskinan, diskriminasi baik gender, ras maupun agamanya. Teori agregat dibedakan menjadi dua yakni *case aggregate poverty theory* dan *generic poverty theory*. *Case theory* menyatakan bahwa kemiskinan memang diakibatkan oleh faktor-faktor seperti teori individu, namun secara agregat faktor-faktor tersebut juga berpengaruh. dimisalkan adalah tingkat pendidikan agregat, kesehatan agregat, atau budaya keseluruhan dalam suatu masyarakat yang menyebabkan produktivitas masyarakat rendah sehingga kemiskinan eksis di masyarakat tersebut. Sedangkan, *generic theory* menyatakan kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor yang lebih global seperti : ketersediaan kerja layak yang terbatas, kegagalan pasar, pendapatan nasional yang rendah.

2. Teori *Phill Bartle* dan *Theori Philip dan Rayhan*

Bartle menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari suatu kejadian atau *shock* yang menyerang suatu individu. Bartle berpendapat bahwa ada kecenderungan orang miskin untuk menggantungkan diri sehingga bertahan dalam kemiskinan. Selain itu ada juga faktor yang menghalangi seseorang keluar dari kemiskinan seperti level pendidikan, kegagalan pasar, ketidakcukupan infrastruktur, serta rendahnya kapital yang menyebabkan kemiskinan semakin berlanjut. Mirip dengan Bartle, Philip dan Rayhan juga mengatakan penyebab kemiskinan diantaranya adalah perang, bencana alam, rendahnya pendidikan, rendahnya kesehatan, serta faktor mentalitas dan budaya sebagai penyebab bertahannya kemiskinan.

3. Teori Lingkaran Kemiskinan (*Poverty Cycle*)

Teori lingkaran kemiskinan berkembang sangat umum dengan berbagai versi, secara general mengatakan suatu kesamaan, yaitu variabel "X" tertentu yang berperan sebagai penyebab kesimbangan kemiskinan. Variabel yang menjadi penyebab (atau determinan) kemiskinan dan akan muncul kembali sebagai akibat (indikator) dari kemiskinan tersebut, sekaligus memulai lagi putaran kemiskinan yang baru terus menerus. Beberapa yang paling umum meletakkan faktor-faktor di bawah ini sebagai determinan (dengan pendekatan individu) : Rendahnya pendidikan, Kualitas kesehatan yang buruk, Banyaknya anak adalah investasi bagi orang miskin, Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya saving (karena pendapatan habis untuk konsumsi).

4. Teori Modal (*Capital*) David Piachaud

Menurut Piachaud, penyebab-penyebab kesejahteraan hampir selalu tertuang dalam bentuk modal atau *capital* dan modal tersebut digolongkan beberapa jenis : Modal keuangan, Modal fisik, Modal manusia, Infrastruktur publik, Modal sosial.

Hendra (2010) mengatakan kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda tergantung dari pengalaman dan perspektif analisis. Cara pandang analisis akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana kemiskinan itu terjadi (sebab-sebab kemiskinan) dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Oleh karena itu, agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjelaskan pengertian dan penyebab kemiskinan secara lengkap.

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam kategori miskin. Namun menurut *World Bank* setidaknya ada tiga faktor penyebab utama kemiskinan, yaitu :

1. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti : makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan.
2. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat.
3. Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya.

Menurut Todaro dan Smith (2003) kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 (enam) karakteristik sebagai berikut :

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
2. Pendapatan perkapita negara-negara dunia ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa negara yang mengalami stagnasi.
3. Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata.
4. Mayoritas penduduk di negara-negara dunia ketiga harus hidup di bawah tekanan garis kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara dunia ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.
6. Fasilitas pendidikan dikebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

2.1.3 Karakteristik Golongan Miskin

Menurut Zelinsky (1996) karakteristik penduduk dapat dikategorikan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan rumah tempat tinggal, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, penggunaan lahan dan kecukupan gizi serta perawatan kesehatan bisa menjadi indikator peningkatan kehidupan sosial masyarakat. Karakteristik golongan miskin yang disarikan menurut pendapat Remi dan Tjiptoherianto (2002) dan beberapa pendapat lainnya dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Karakteristik sosial penduduk miskin, antara lain jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan dan kesehatan.
2. Karakteristik ekonomi penduduk miskin, antara lain lapangan usaha penduduk miskin dan status dalam pekerjaan, infrastruktur yang tersedia,
3. Karakteristik Budaya

Tim LPEM-FEUI dalam studi Empiris menjelaskan bahwa profil kemiskinan membantu keberhasilan dari program pembangunan melalui ketepatan identifikasi target group dan target area. Menurut tim LPEM-FEUI kemiskinan rumah tangga dapat dilihat dari 5 (lima) karakteristik, masing-masing: karakteristik lokasi geografis; karakteristik demografis; karakteristik ekonomi yang terdiri dari jabatan/pekerjaan, sumber penghasilan, pola konsumsi; karakteristik sosial budaya; karakteristik sistem ekonomi, berupa kriteria-kriteria khusus yang berhubungan dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada saat itu, yakni asumsi dasar (keswadayaan, bantuan modal, organisasi kelompok), kegiatan ekonomi sasaran IDT (petani gurem, buruh tani, nelayan dan perambah hutan), dan cara bertahan hidup yakni kondisi ketergantungan pada pihak lain.

Penelitian kemiskinan pada skala provinsi pernah dilakukan oleh Usman (2006) untuk provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data Susenas Kor Tahun 2002. Metode pengolahan data adalah Indeks FGT dan Regresi Logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Karakteristik geografis daerah (desa atau kota);

- b) Karakteristik sosial demografi, terdiri dari usia kepala rumah tangga, kepala rumah tangga wanita, rasio ketergantungan dan jumlah anak, jaringan sosial, konsumsi makanan berprotein tinggi;
- c) Karakteristik pendidikan terdiri dari literasi, jenjang pendidikan orang tua;
- d) Karakteristik ketenagakerjaan, terdiri dari jenis lapangan usaha dan status pekerjaan kepala rumah tangga, jumlah jam kerja kepala rumah tangga, istri dan anak bekerja,
- e) Karakteristik perumahan, terdiri dari kondisi lantai, sumber air minum, kondisi tempat buang air besar, dan konsumsi bahan bakar.

2.2 Penelitian-Penelitian Terdahulu

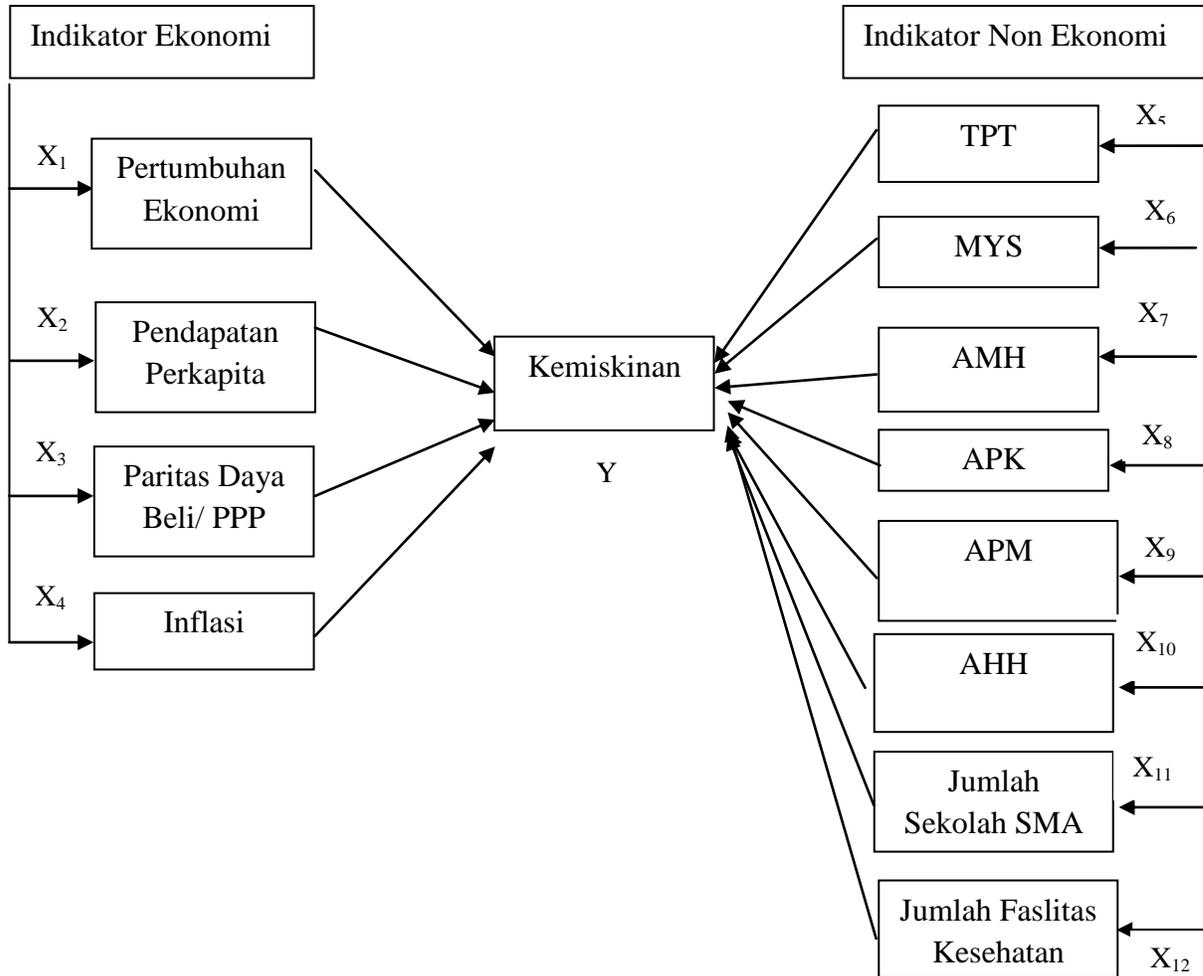
Beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti/penulis khususnya mengenai kemiskinan diantaranya adalah oleh Anggraini (2007), penelitian tersebut membahas tentang pengaruh zakat terhadap kemiskinan dan pendapatan masyarakat. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan SNSE 2003. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pendapatan dan tingkat upah yang diperoleh oleh tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap kemiskinan masyarakat. Pendapatan masyarakat secara total jika diagregasi merupakan Pendapatan Domestik Regional bruto (PDRB). Perkembangan dari PDRB dari tahun ke tahun dikenal dengan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain dilakukan oleh Azami (2009), yang melakukan penelitian dengan metode analisis model data panel tentang Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan pendidikan terhadap kemiskinan : studi kasus provinsi Jawa timur tahun 2001-2007. Hasil penelitian tersebut diantaranya menyimpulkan bahwa selama periode penelitian dapat diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Terbukti berturut kemudian variabel pendidikan dan variabel produktivitas tenaga kerja. Variabel pertumbuhan ekonomi, produktivitas pekerja dan pendidikan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur pada periode 2001-2007. Namun pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

Anggraeni, Ayu Dewi (2009) melakukan penelitian dengan judul Profil Kemiskinan dan Faktor Determinan Kemiskinan Kabupaten Bogor (*Study Kasus Desa Jogjong, Cisarua, Bogor*). Hasil penelitian tersebut Anggraeni mengatakan bahwa Yang menjadi ciri-ciri penduduk miskin di Desa Jogjong, Cisarua, *Bogor* adalah sebagai berikut : Karakteristik Demografi : jumlah anggota RT lebih dari 5 orang, rumah tanga di perdesaan, pendidikan ibu RT rendah, rasio pengeluaran makanan lebih besar. Karakteristik Ekonomi : sektor tempat bekerja kepala RT pertanian dan industri, ada fasilitas kredit. Karakteristik Sosial : luas lantai tidak memadai, penggunaan jamban secara bersama.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah seperti yang digambarkan dalam bagan di bawah ini :



2.4 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, daya beli masyarakat, inflasi, pengangguran, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka harapan hidup, jumlah fasilitas sekolah menengah atas dan jumlah fasilitas kesehatan merupakan yang menjadi penyebab kemiskinan masih tinggi di Provinsi Maluku.
2. Diduga bahwa faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kemiskinan yang terjadi di Provinsi Maluku adalah variabel pendidikan dan kesehatan.

3. Diduga bahwa kemiskinan di Provinsi Maluku memiliki karakteristik seperti pendidikan masyarakat yang masih rendah, lapangan pekerjaan masyarakat masih pada sektor pertanian, perumahan belum layak huni, infrastruktur yang masih minim dan sebagainya.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan periode waktu tahun 2005-2011 di Provinsi Maluku. Provinsi Maluku memiliki ibukota yang terletak di Kota Ambon dan sejak tahun 2008 terdiri dari sebelas Kabupaten/kota. Namun pada penelitian ini hanya digunakan 8 (delapan) kabupaten/kota.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dari BPS dan data pendukung lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung penelitian baik dari instansi atau berbagai sumber lainnya.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan terdiri dari 2 (dua) macam, hal ini disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini. Adapun ketiga metode analisis tersebut adalah sebagai berikut :

3.3.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk member gambaran terhadap sesuatu objek yang diteliti melalui data sebagaimana adanya. Bentuk penyajiannya adalah dengan menggunakan tabel dan grafik. Diharapkan dengan analisis ini secara visual dapat terlihat bagaimana perkembangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, distribusi pendapatan dan inflasi di Provinsi Maluku selama periode 2005-2011.

3.3.2 Analisis Regresi Data Panel

Data panel (*pooled data*) adalah gabungan dari data time series dan *cross section* sekaligus. Analisis regresi yang menggunakan data panel mempunyai tiga macam model, yaitu model *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Model *common effect* merupakan model yang paling sederhana, yaitu hanya mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* dalam bentuk *pooled*. Sementara dalam model *fixed effect* diasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi melalui perbedaan intersepnya. Intersep pada setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi. Yang terakhir adalah *random effect*, dalam model ini kita akan memilih estimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Sehingga model ini mengasumsikan bahwa setiap individu mempunyai perbedaan intersep yang merupakan variabel random atau stokastik.

Untuk menguji mana yang lebih baik maka akan digunakan uji F (menguji apakah *fixed effect* lebih baik dari *common effect*) dan uji *Haussman* (untuk menguji mana yang lebih baik antara *random effect* dan *fixed effect*).

3.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan koefisien yang mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan dengan variasi variabel independen, dimana nilai R^2 mempunyai rentang nilai 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin baik. Koefisien dirumuskan sebagai berikut :

$$R^2 = R^2 = \frac{(\bar{Y}_i - \bar{Y})^2}{(Y_i - \bar{Y})^2}$$

Kelemahan mendasar dari koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak penelitian menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model.

Untuk menghitung R^2 dapat juga didekati dengan menghitung koefisien korelasi (R) terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk interval atau rasio.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Kondisi Kemiskinan di Provinsi Maluku

Pengukuran kemiskinan di Indonesia selama ini lebih banyak dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Konsep dari pendekatan ini adalah dengan melihat kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*). Untuk mengukur tingkat kemiskinan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan metode garis kemiskinan pengeluaran. Garis kemiskinan pengeluaran tersebut terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

Dari tabel perkembangan garis kemiskinan di Maluku dapat dilihat bahwa hingga pada tahun 2010 garis kemiskinan di Maluku sebesar Rp 226.030,- dimana garis kemiskinan pengeluaran makan adalah sebesar Rp 174.525,- dan garis kemiskinan pengeluaran non makanan adalah sebesar Rp 51.504,-. Lebih dari 70 persen garis kemiskinan di Maluku disumbang oleh komoditi makanan. Hal ini membuktikan bahwa pengeluaran penduduk Maluku masih didominasi oleh pengeluaran untuk makanan dibandingkan dengan non makanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penduduk Maluku adalah termasuk berpendapatan rendah. Karena salah satu ciri-ciri penduduk berpendapatan tinggi adalah pengeluaran konsumsi untuk makanan lebih rendah daripada bukan makanan.

Tabel 1 Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku
Menurut Komponen Tahun 2007-2011

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Sumbangan Garis Kemiskinan (%)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2007	142.964,-	36.588,-	179.552,-	79,62	20,38	100,00
2008	149.989,-	38.942,-	188.931,-	79,39	20,61	100,00
2009	161.232,-	46.538,-	207.771,-	77,60	22,40	100,00
2010	174.525,-	51.504,-	226.030,-	77,21	22,79	100,00
2011	188.493,-	56.627,-	245.120,-	76,77	23,22	100,00

Sumber : BPS

Tabel 2 Perkembangan indikator Kemiskinan di Provinsi Maluku, Tahun 2005-2011

Indikator Kemiskinan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a) Persentase Penduduk Miskin (p_0)							
- Kota	13,57	13,86	14,49	12,97	11,03	10,20	10,24
- Desa	38,89	39,87	37,02	35,56	43,30	33,94	30,54
- Kota + Desa	32,28	33,03	31,14	29,66	28,23	27,74	23,00
b) Poverty Gap Index/ P_1							
- Kota	2,77	2,09	2,49	1,70	1,75	1,36	1,98
- Desa	6,66	9,73	7,79	7,37	6,94	6,59	6,77
- Kota + Desa	5,78	7,51	6,41	5,89	5,59	5,23	4,99
c) Poverty Severity Index / P_2 (%)							
- Kota	0,93	0,60	0,61	0,40	0,38	0,27	0,55
- Desa	1,59	3,42	2,29	2,23	2,12	1,90	2,13
- Kota + Desa	1,54	2,60	1,85	1,75	1,67	1,47	1,54

Sumber : BPS

Dalam analisis tentang kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering dipergunakan adalah *head-count index* (P_0). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun demikian, indikator ini tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seseorang yang miskin bertambah miskin. Oleh karena itu dikenal juga indikator kemiskinan yang lain, yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P_1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P_2).

Tingkat kedalaman kemiskinan (P_1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di

antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P_2).

**Tabel 3 Persentase Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2005-2011**

Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Maluku Tenggara Barat	45,29	46,25	44,15	40,17	37,23	36,05	30,13
Maluku Tenggara	36,73	37,84	35,98	32,90	30,62	31,23	27,16
Maluku Tengah	37,14	38,21	36,03	32,61	30,48	28,42	25,15
Buru	33,00	33,34	31,34	29,17	27,57	26,29	22,00
Aru	37,58	38,45	36,88	41,08	38,77	34,98	30,96
Seram Bagian Barat	37,78	39,59	37,85	35,19	33,11	30,09	26,70
Seram Bagian Timur	39,98	40,18	39,83	36,98	34,67	31,46	27,94
Ambon	6,56	7,43	6,51	7,92	7,61	7,67	6,83
Maluku	32,28	33,03	31,14	29,24	27,29	27,70	23,00

Sumber : BPS

5.2 Analisis Kondisi Pertumbuhan Ekonomi

**Tabel 4 Pertumbuhan Ekonomi Maluku
Menurut Lapangan Usaha tahun 2005-2011 (%)**

Lapangan Usaha	Tahun						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian,	3,63	2,97	4,13	2,89	4,06	5,66	3,56
Pertambangan & Penggalian	3,58	4,14	-8,33	4,95	3,95	10,08	14,07
Industri Pengolahan	3,62	5,22	12,41	4,54	6,97	0,40	7,22
Listrik, Gas & Air Bersih	6,17	7,24	5,05	1,94	-16,54	16,09	7,14
Bangunan	5,77	6,73	7,33	4,49	6,97	47,15	11,18
Perdagangan, Hotel & Restoran	5,98	7,60	6,85	5,32	6,00	6,30	6,81
Pengangkutan Dan Komunikasi	10,61	11,18	9,62	4,92	7,00	6,51	5,47
Keuangan Persewaan Dan Jasa Perusahaan	3,91	5,03	5,48	4,28	4,41	2,50	3,48
Jasa-Jasa	4,46	4,74	3,28	4,60	6,60	7,61	9,14
PDRB	5,07	5,55	5,62	4,23	5,43	6,48	6,06

Sumber : BPS

Pertumbuhan ekonomi maluku secara total selama periode 2005-2010 fluktuatif namun selalu positif dan masih 1 (satu) digit. Namun jika ditilik menurut sektor dapat dilihat bahwa sektor pertanian pertumbuhannya relatif lebih kecil dibandingkan sektor lainnya dan selalu di bawah pertumbuhan ekonomi secara total. Padahal sektor pertanian merupakan sektor dengan sumbangan terbesar pada PDRB dan paling banyak menyerap tenaga kerja. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor dengan tenaga kerja yang rendah dalam produktivitasnya.

5.3 Analisis Kondisi Pendapatan Perkapita

Indikator pertama yang digunakan dalam pengukur pembangunan adalah kekayaan rata-rata. Sebuah negara yang melakukan pembangunan dinilai berhasil jika pertumbuhan masyarakatnya cukup tinggi. Ukuran pertumbuhan ekonomi masyarakat dinilai tinggi berdasarkan produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut dalam setiap tahunnya melalui pengukuran Produk Nasional Bruto (PNB, atau Gross National Product [GNP]) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Caranya adalah dengan mengukur PNB per kapita atau per orang suatu negara dalam kurun waktu satu tahun. Dengan demikian, dengan menggunakan indikator ini dapat terlihat bahwa sebuah negara yang memiliki PNB per kapita per tahun sebesar US \$1.000 dianggap lebih berhasil pembangunannya dari pada negara yang hanya berpenghasilan US \$800.

Pendapatan perkapita kabupaten/kota di Provinsi Maluku dapat dikatakan memiliki disparitas yang cukup tinggi. Kota Ambon sebagai daerah yang memiliki pendapatan perkapita paling tinggi pada tahun 2010 mencapai hampir Rp 9,5 juta, sedangkan Seram Bagian Timur merupakan daerah dengan pendapatan perkapita paling rendah yakni hanya sebesar Rp 2,5 juta. Dan juga dapat dilihat bahwa Maluku Tenggara Barat merupakan kabupaten dengan pendapatan perkapita tertinggi kedua setelah Kota Ambon, namun nilai pendapatan perkapitanya hanya sekitar separuh dari pendapatan perkapita di Kota Ambon.

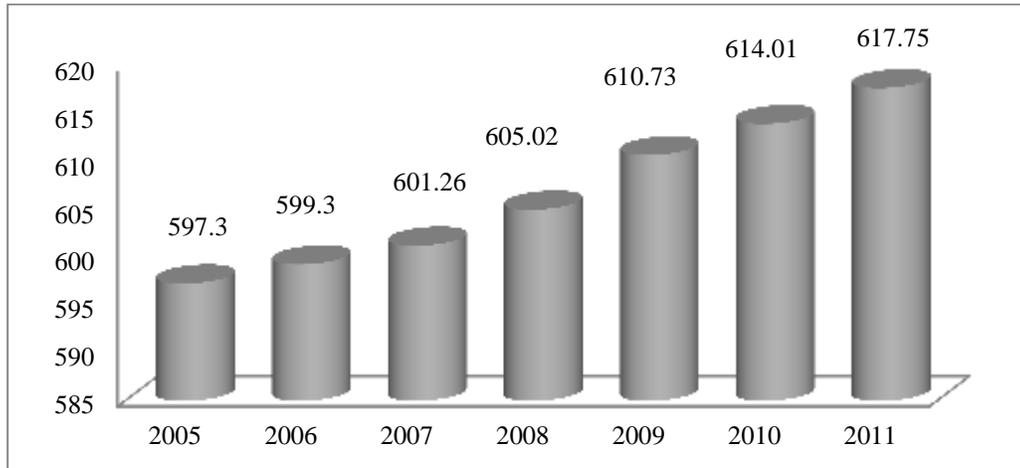
Tabel 5 Nilai Pendapatan Perkapita Provinsi Maluku
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku
Tahun 2005-2010 (dalam 000 Rupiah)

Kab/Kota/ Prov	Tahun					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MTB	3.002,19	3.202,56	3.488,15	3.834,84	4.147,29	4.642,80
MALRA	2.712,57	2.958,26	3.176,13	3.481,53	3.763,17	4.115,79
MALTENG	1.759,98	1.930,20	2.113,29	2.333,26	2.465,88	2.943,73
BURU	2.315,41	2.445,35	2.646,10	2.872,36	3.080,79	3.121,07
ARU	2.768,21	3.055,65	3.283,64	3.619,31	3.893,58	4.383,21
SBB	2.140,04	2.231,35	2.449,78	2.703,62	2.919,47	3.233,48
SBT	1.869,66	2.053,66	2.137,92	2.373,21	2.575,11	2.539,51
AMBON	6.675,91	7.543,97	8.153,37	9.260,47	9.934,11	9.450,31
MALUKU	3.070,77	3.361,17	3.680,73	4.013,13	4.423,21	4.823,88

Sumber : BPS

5.4 Analisis Kondisi Daya Beli

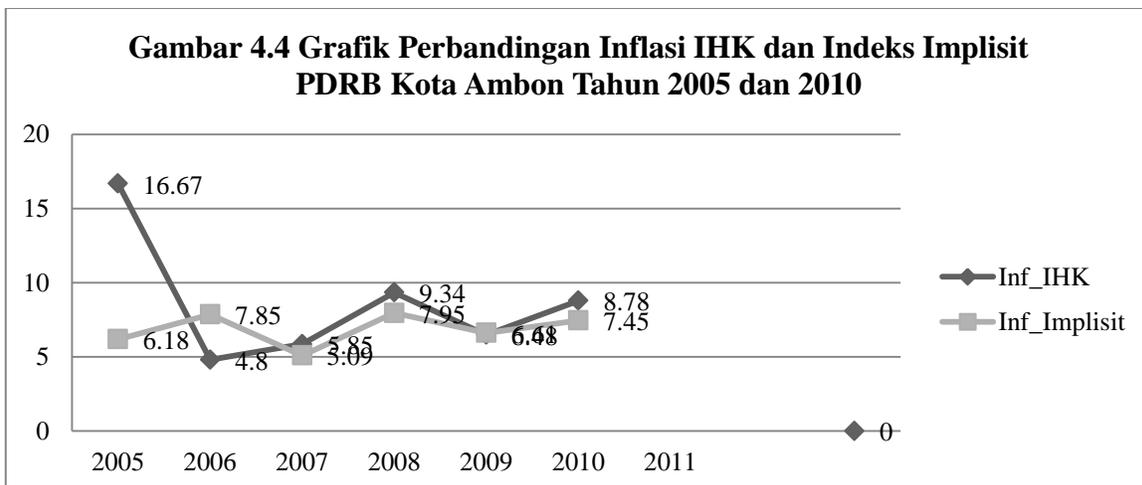
Gambar 4.2 Perkembangan Daya Beli Masyarakat di Provinsi Maluku tahun 2005-2011



Sumber: Badan Pusat Statistik

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antarwilayah, karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antarwilayah masih belum sebanding, oleh karena itu diperlukanlah standardisasi. Misalkan satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan standardisasi ini perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antarwilayah menjadi terbanding.

5.5 Analisis Kondisi Inflasi



Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa yang terjadi berdampak langsung pada tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat.

5.6 Analisis Kondisi Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya yang telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat dilapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian. Di Indonesia, usia kerja yang digunakan untuk keperluan pengumpulan data ketenagakerjaan adalah 15 tahun ke atas.

Tabel 6 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas
Menurut Kegiatan Utama Di Provinsi Maluku 2005-2010

Kegiatan Utama	2005	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	821.220	859.502	877.251	890.217	910.844	979.714
Angkatan Kerja	481.399	515.553	552.729	559.239	596.030	651.339
- Bekerja	409.137	441.071	485.308	499.555	533.015	586.430
- Pengangguran Terbuka	72.262	74.482	67.421	59.684	63.015	64.909
Bukan Angkatan Kerja	339.361	343.949	324.552	330.978	314.814	328.375
TPAK (%)	58,62	59,98	63,01	62,82	65,44	66,48
TPT (%)	15,01	14,45	12,20	10,67	10,57	9,97

Sumber: Sakernas

Tabel 7 Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja dan Persentase Pengangguran
Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku, 2009-2010

Tahun	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Lk	Pr	
2009					
- Angkatan Kerja	161.501	434.529	363.727	232.303	596.030
- Bekerja	135.674	397.341	332.386	200.629	533.015
- Pengangguran (%)	15,99	8,56	8,62	13,63	10,57
2010					
- Angkatan Kerja	200.588	450.751	386.994	264.345	651.339
- Bekerja	171.546	414.884	361.051	225.379	586.430
- Pengangguran (%)	14,48	7,96	6,70	14,74	9,97

Sumber: Sakernas

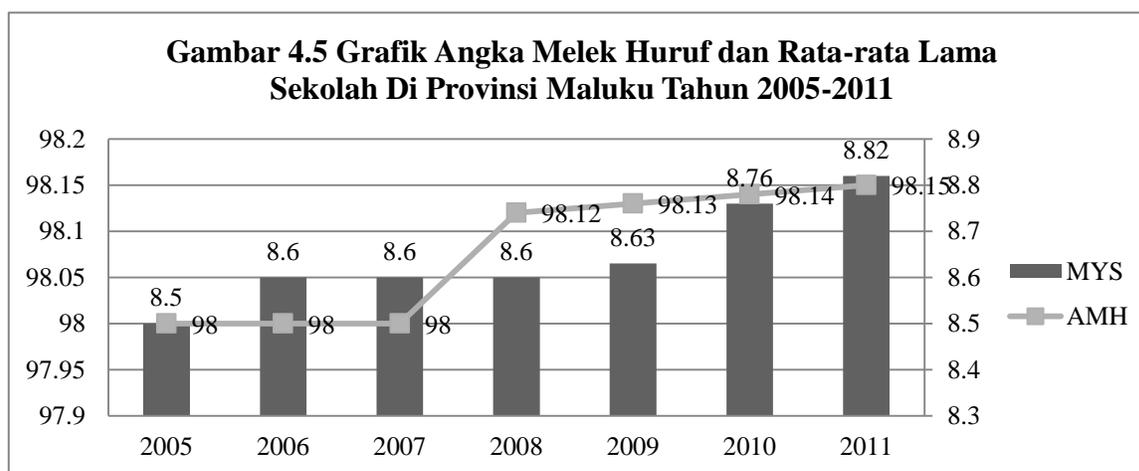
Ditinjau menurut tipe daerah maka dapat diketahui bahwa daerah perkotaan memiliki persentase pengangguran yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pengangguran di daerah perdesaan. Dimana persentase pengangguran di daerah kota hampir dua kali lipat dari persentase pengangguran di daerah desa. Hal ini terjadi disebabkan karena penduduk di kota biasanya lebih selektif dalam memilih pekerjaan serta lebih berpendidikan sehingga lowongan pekerjaan yang tersedia sangat sedikit yang sesuai dengan jurusan pendidikannya. Sedangkan tenaga kerja di perdesaan biasanya hanya bergerak di sektor pertanian dan tidak membutuhkan keterampilan khusus. Sehingga tenaga kerja baru sangat gampang untuk masuk ke sektor usaha tersebut.

Tabel 8 Persentase Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 2005-2011

Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Maluku Tenggara Barat	5,89	5,89	9,27	5,80	6,85	5,81	6,12
Maluku Tenggara	8,15	10,46	8,81	7,80	10,51	10,66	7,45
Maluku Tengah	18,16	15,30	12,80	12,24	14,59	12,17	6,45
Buru	11,11	9,92	10,69	10,17	6,52	6,33	6,22
Aru	5,60	5,60	11,63	5,85	5,55	3,85	6,90
Seram Bagian Barat	17,30	25,59	11,14	10,59	8,09	6,20	6,71
Seram Bagian Timur	17,56	17,56	10,04	7,57	8,54	6,89	5,44
Ambon	29,11	18,24	18,38	16,72	17,57	14,46	10,73
Maluku	12,30	14,45	12,20	10,67	10,57	9,97	

Sumber : BPS

5.7 Analisis Kondisi Pendidikan



Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar, menengah, baik umum

maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula tidak kalah pentingnya peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.

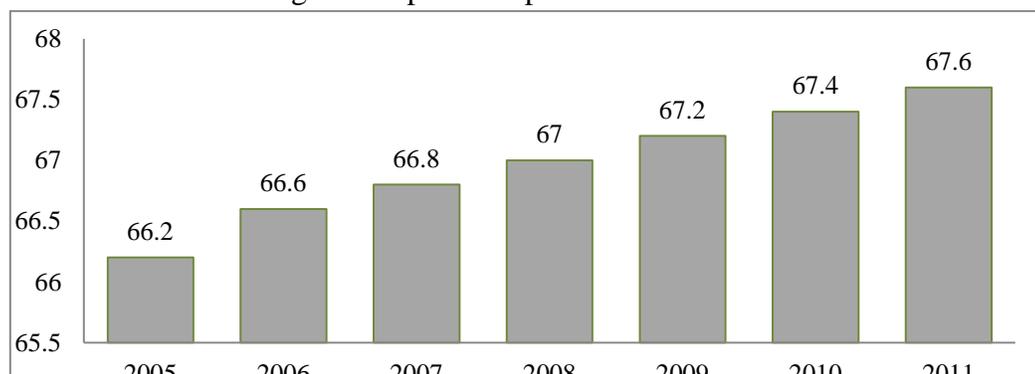
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun keatas.

5.8 Analisis Kondisi Kesehatan

Salah satu indikator yang sangat penting pada aspek kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup pada waktu lahir (e_0) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini paling banyak digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Logikanya, semakin baik kualitas kesehatan maka angka harapan hidup penduduk akan meningkat.

AHH diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. AHH dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH), yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP).

Gambar 4.6 Angka Harapan Hidup Di Provinsi Maluku Tahun 2005-2011



Sumber: Badan Pusat Statistik

5.9 Analisis Kondisi Infrastruktur

Maluku sebagai salah satu provinsi di timur Indonesia sayangnya kurang mendapatkan prioritas dalam proses pembangunan beberapa dasawarsa yang lalu. Keadaan tersebut diperparah dengan konflik sosial yang pecah pada 1999. Terdiri atas 1.228 pulau besar dan kecil, kepulauan Maluku membentang dari utara hingga selatan. Dengan garis pantai sepanjang 11.244 km dan luas wilayah 712.479 km² serta penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa (2011), Maluku memiliki potensi lebih dari cukup untuk membangun.

Tabel 9 Jumlah SMA dan Jumlah Fasilitas Kesehatan
Di Provinsi Maluku Tahun 2005-2010

Tahun	Jumlah SMA	Jumlah Fasilitas Kesehatan
(1)	(2)	(3)
2005	126	593
2006	155	539
2007	172	562
2008	179	613
2009	179	700
2010	186	647

Sumber : BPS Provinsi Maluku

5.10 Faktor Determinan Kemiskinan Di Provinsi Maluku

Dalam penelitian ini untuk menentukan faktor determinan kemiskinan di Maluku dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel. Variabel dependen yang digunakan adalah persentase kemiskinan (P0). Sedangkan variabel independen digunakan sebanyak 10 variabel yakni pertumbuhan ekonomi (PE), pendapatan perkapita (PPK), paritas daya beli (DB), inflasi (INF), tingkat pengangguran terbuka (TPT), rata-rata lama sekolah/*mean years school* (MYS), angka melek huruf (AMH), angka parsipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka harapan hidup (AHH), jumlah sekolah menengah atas (JSS) dan jumlah fasilitas kesehatan (JFK).

Analisis regresi data panel dilakukan dengan menggunakan pendekatan *common effect*, *fixed effect* serta *random effect*. Untuk menguji pendekatan mana yang digunakan maka dilakukan uji Hausmann. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat efek random di dalam panel data. Dalam penghitungan statistik uji hausmann diperlukan asumsi bahwa banyaknya kategori *cross section* lebih besar dibandingkan jumlah variabel independen (termasuk konstanta) dalam model. Lebih lanjut, dalam mengestimasi statistik uji hausmann diperlukan estimasi variansi *cross section* yang positif, yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh model. Apabila kondisi-kondisi ini tidak terpenuhi maka hanya dapat digunakan model *fixed effect*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penulisan ini model yang digunakan adalah *fixed effect* karena jumlah *cross section* sebanyak 6 (enam) lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah variabel yakni sebanyak 13 variabel (termasuk konstanta).

Pendekatan *fixed effect* merupakan pendekatan untuk menangkap masalah heterogenitas dengan menggunakan suatu ukuran pembeda dummy. Masalah heterogenitas ini dapat merupakan masalah heterogenitas pada *cross section* atau pada waktu. Estimasi dengan menggunakan *fixed effect* dapat dilakukan dengan tiga model yakni :

1. Asumsi intersep dan slope sama untuk semua perusahaan dan tidak ada perbedaan pada waktu.
2. Asumsi intersept berbeda dan slope sama untuk semua perusahaan dan tidak ada perbedaan dalam waktu.
3. Seluruh koefisien dan intersep bervariasi antar individual.

Adapun hasil estimasi *fixed effect* untuk tiga asumsi di atas dalam penelitian ini masing-masing adalah sebagai berikut :

Dari output pengolahan didapat hasil estimasi yang sama untuk semua kabupaten/kota sebagai berikut :

$$P_0 = -7,487633 - 0,205081.PE - 0,166156.PPK - 0,254178.DB^* + 4,589774.INF^* - 0,056040.TPT - 1,719121.MYS^* + 5,684436.AMH^* - 0,289370.APK^* + 0,214500.APM - 8,968325.AHH^* - 0,084382.JSS - 0,081298.JSK$$

$$R^2 = 0,972$$

Keterangan :

P0 : Tingkat Kemiskinan

PE : Pertumbuhan Ekonomi

PPK : Pendapatan Perkapita

DB : Daya Beli

INF : Inflasi

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

MYS : Rata-rata Lama Sekolah

AMH : Angka Melek Huruf

APK : Angka Partisipasi Kasar

APM : Angka Partisipasi Murni

AHH : Angka Harapan Hidup

JSS : Jumlah Sarana Sekolah SMU

JSK : Jumlah Sarana Kesehatan

Interpretasi :

Pengolahan atas dapat disimpulkan bahwa Asumsi intersep dan slope sama untuk semua perusahaan dan tidak ada perbedaan pada waktu untuk masing-masing kabupaten/kota memiliki persamaan kemiskinan yang sama. Dengan kata lain seluruh kabupate/kota memiliki perilaku dan kondisi awal yang sama. Dengan tingkat signifikansi 5 (lima) persen dapat disimpulkan bahwa hanya 6 (enam) variabel yang signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku yakni Daya Beli (DB), Inflasi (INF), Rata-Rata Lama Sekolah

(MYS), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Harapan Hidup (AHH).

Dari output pengolahan didapat hasil estimasi yang berbeda slope untuk masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut :

$$P_{0_MTB} = 1,298647 - 0.108632.DB^* - 2.314997.INF^* - 0.861300.MYS^* + 8.173260.AMH - 0.081281.APK - 7.676372.AHH^*$$

$$P_{0_Malra} = 1,655977 - 0.108632.DB^* - 2.314997.INF^* - 0.861300.MYS^* + 8.173260.AMH - 0.081281.APK - 7.676372.AHH^*$$

$$P_{0_Malteng} = 1,378553 - 0.108632.DB^* - 2.314997.INF^* - 0.861300.MYS^* + 8.173260.AMH - 0.081281.APK - 7.676372.AHH^*$$

$$P_{0_Buru} = 1,861488 - 0.108632.DB^* - 2.314997.INF^* - 0.861300.MYS^* + 8.173260.AMH - 0.081281.APK - 7.676372.AHH^*$$

$$P_{0_Aru} = 1,597457 - 0.108632.DB^* - 2.314997.INF^* - 0.861300.MYS^* + 8.173260.AMH - 0.081281.APK - 7.676372.AHH^*$$

$$P_{0_SBB} = 1,518352 - 0.108632.DB^* - 2.314997.INF^* - 0.861300.MYS^* + 8.173260.AMH - 0.081281.APK - 7.676372.AHH^*$$

$$P_{0_SBT} = 1,368842 - 0.108632.DB^* - 2.314997.INF^* - 0.861300.MYS^* + 8.173260.AMH - 0.081281.APK - 7.676372.AHH^*$$

$$P_{0_Ambon} = 1,015732 - 0.108632.DB^* - 2.314997.INF^* - 0.861300.MYS^* + 8.173260.AMH - 0.081281.APK - 7.676372.AHH^*$$

$$R^2 = 0,988$$

Interpretasi :

Dari hasil output pengolahan dapat disimpulkan bahwa Asumsi intersept berbeda dan slope sama untuk semua perusahaan dan tidak ada perbedaan dalam waktu untuk masing-masing kabupaten/kota memiliki persamaan kemiskinan yang berbeda pada intersept tetapi sama slope. Dengan kata lain seluruh kabupate/kota memiliki perilaku dan kondisi awal yang tidak sama. Dengan tingkat signifikansi 5 (lima) persen dapat disimpulkan bahwa hanya 4 (empat) variabel yang signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota yakni Daya Beli (DB), Inflasi (INF), Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Harapan Hidup (AHH).

Dari output pengolahan didapat hasil estimasi yang berbeda slope untuk masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut :

$$P_{0_MTB} = 7,962583 - 0.486846.DB + 2.706753.INF + 0.440469.MYS - 22.43053.AHH^*$$

$$P_{0_Malra} = 8,925581 - 0.016912.DB + 0.124504.INF + 0.795994.MYS - 20.94241.AHH$$

$$P_{0_Malteng} = -3,950036 - 0.190424.DB - 7.336609.INF - 0.368681.MYS + 2.928450.AHH$$

$$P_{0_Buru} = 2,596746 - 0.021849.DB + 17.06071.INF + 2.437632.MYS - 32.45985.AHH$$

$$P_{0_Aru} = 3,509587 - 0.027657.DB + 7.120287.INF - 19.05682.MYS - 9.144587.AHH$$

$$P_{0_SBB} = 7,295217 - 0.185010.DB - 11.59443.INF + 4.398982.MYS - 1.027743.AHH$$

$$P_{0_SBT} = 3,150001 - 0.119336.DB - 2.858928.INF - 5.091158. + 0.204696.AHH$$

$$P_{0_Ambon} = 1,150146 - 0.075770.DB + 25.04338.INF - 14.76636.MYS - 31.58049.AHH$$

$$R^2 = 0,997$$

Interpretasi :

Dari hasil output pengolahan dapat disimpulkan bahwa Asumsi Seluruh koefisien dan intersep bervariasi antar individual untuk masing-masing kabupaten/kota memiliki persamaan kemiskinan yang berbeda pada intersept slope berbeda. Dengan kata lain seluruh kabupaten/kota memiliki perilaku dan kondisi awal yang tidak sama. Pada persamaan hanya 4 (empat) variabel yang dimasukkan mengingat untuk mencari model dengan asumsi Seluruh koefisien dan intersep bervariasi antar individual maka jumlah variabel harus lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah *cross section*. Dengan kata lain AMH dan APK diabaikan mengingat variabel pendidikan cukup diwakili oleh variabel MYS saja. Dengan tingkat signifikansi 5 (lima) persen dapat disimpulkan bahwa ;

- Kabupaten Maluku Tenggara Barat variabel yang signifikan pada 5 persen adalah Daya Beli dan Angka Harapan Hidup
- Kabupaten Buru variabel yang signifikan pada 5 persen adalah Inflasi, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan hidup
- Kabupaten Seram Bagian Timur variabel yang signifikan pada 5 persen adalah Daya Beli dan Rata-rata Lama Sekolah
- Kota Ambon variabel yang signifikan pada 5 persen adalah Inflasi

Dari semua penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa variabel yang menjadi determinan kemiskinan di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut Daya Beli (DB), Inflasi (INF), Rata-Rata Lama Sekolah (MYS), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Harapan Hidup (AHH). Namun jika diteliti lebih jauh ke kabupaten/kota maka dapat diketahui bahwa ada beberapa kabupaten/kota yang kemiskinannya lebih dideterminasi oleh beberapa variabel seperti Kabupaten Maluku Tenggara Barat didominasi oleh Angka Harapan Hidup, Buru didominasi oleh Inflasi, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup, Seram Bagian Timur didominasi oleh Daya Beli dan Rata-rata Lama Sekolah, Ambon didominasi oleh Inflasi. Sedangkan Kabupaten/kota lainnya memiliki pola kemiskinan sama seperti Provinsi Maluku pada umumnya.

5.11 Faktor Determinan Kemiskinan yang Paling Dominan Di Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil koefisien determinasi dengan menggunakan analisis koefisien korelasi pearson dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi pearson parsial yang paling tinggi ditunjukkan oleh koefisien korelasi pearson untuk variabel Angka Harapan Hidup (AHH). Dengan Nilai $R = -0,889$. Dengan demikian nilai R^2 atau koefisien determinasi adalah sebesar 0.8082 atau 80,82%. Secara parsial dapat dilihat bahwa tingkat kesehatan dalam hal ini Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki korelasi yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat kesehatan atau angka harapan hidup maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi di Maluku, dimana 80,82% tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh Angka Harapan Hidup (AHH). Korelasi paling tinggi berikutnya adalah Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dengan nilai $R = -0,837$. Dengan demikian nilai R^2 atau koefisien determinasi adalah sebesar 0.7006 atau 70,06%. Dengan kata lain semakin tinggi

tingkat pendidikan atau rata-rata lama sekolah maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi di Maluku, dimana 70,06% tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Hal ini sejalan juga dengan Analisis regresi data panel dilakukan dengan menggunakan pendekatan *common effect*, *fixed effect* dapat diketahui bahwa faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kemiskinan di Maluku selama periode 2005-2011 adalah Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS).

5.12 Karakteristik Penduduk Miskin di Provinsi Maluku

5.12.1 Pendidikan

Tabel 15
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan Di Provinsi Maluku, Tahun 2010

Kabupaten/Kota	<SD	Tamat SD/SLTP	SLTA+
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	35,66	49,64	14,70
Maluku Tenggara	41,09	46,25	12,66
Maluku Tengah	35,83	47,79	16,38
Buru	59,39	37,55	3,07
Aru	42,52	52,74	4,74
Seram Bagian Barat	42,78	45,42	11,80
Seram Bagian Timur	50,44	42,37	7,19
Maluku Barat Daya	37,68	51,55	10,78
Buru Selatan	59,79	33,92	6,29
Ambon	39,33	41,24	19,42
Tual	39,76	50,66	9,58
Maluku	41,57	46,36	12,07

Sumber : BPS

Karakteristik penduduk miskin di Maluku menurut tingkat pendidikannya pada tahun 2010 dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk miskin pendidikannya hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan persentase 46,36 persen. Bahkan 41,57 persen di antara penduduk miskin di Provinsi Maluku tidak tamat Sekolah Dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik pendidikan penduduk miskin di Provinsi Maluku adalah masih berpendidikan rendah. Bahkan di Kabupaten Buru, Buru Selatan dan Seram Bagian Timur lebih dari separuh penduduk miskin berpendidikan tidak tamat Sekolah Dasar. Hanya 12,07 persen penduduk miskin di Provinsi Maluku yang menamatkan pendidikan SLTA+.

5.12.2 Pekerjaan

Karakteristik pekerjaan penduduk miskin di Provinsi Maluku pada tahun 2010 dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk miskin bekerja pada sektor informal yakni 81,96 persen. fenomena menarik adalah bahwa penduduk miskin di Maluku hanya 2,85 persen saja yang pengangguran atau tidak bekerja. Sedangkan sisanya sekitar 15,87 persen diantara penduduk miskin bekerja pada sektor formal.

Tabel 16.
Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas
menurut kabupaten/kota dan Status Bekerja di Provinsi Maluku, Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)	(4)
Maluku Tenggara Barat	0,44	93,30	6,26
Maluku Tenggara	4,16	90,49	5,35
Maluku Tengah	4,09	73,14	22,77
Buru	0,78	80,73	18,49
Aru	0,35	95,89	3,76
Seram Bagian Barat	0,34	86,02	13,64
Seram Bagian Timur	1,13	88,09	10,79
Maluku Barat Daya	1,74	82,39	15,87
Buru Selatan	-	86,61	13,39
Ambon	11,14	59,60	29,26
Tual	6,48	82,15	11,37
Maluku	2,85	81,96	15,20

Sumber : BPS

5.12.3 Perumahan

Tabel 18
Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih dan Jamban Sendiri
Menurut kabupaten/kota dan Luas Lantai Perkapita di Provinsi Maluku, Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih	Rumah Tangga Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)
Maluku Tenggara Barat	68,25	57,43
Maluku Tenggara	56,52	60,88
Maluku Tengah	56,23	68,32
Buru	56,44	64,18
Aru	39,22	41,25
Seram Bagian Barat	58,22	48,57
Seram Bagian Timur	42,18	34,53
Maluku Barat Daya	42,55	36,42
Buru Selatan	17,35	26,25
Ambon	82,10	89,43
Tual	46,94	64,19
Maluku	59,33	63,42

Sumber : BPS

Perumahan yang layak merupakan hak dari seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali penduduk miskin. Selain kebutuhan sandang dan pangan, rumah juga merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Pada saat ini keberadaan rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan status simbol bahkan juga menunjukkan identitas pemiliknya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, dimana kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah tersebut yang dapat terlihat dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut diantaranya dapat terlihat dari luas lantai rumah, sumber air minum dan fasilitas tempat buang air besar.

Karakteristik perumahan rumah tangga miskin di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa baru 59,33 persen penduduk rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih. Bahkan di Kabupaten Buru Selatan persentasenya sangat rendah yakni 17,35 persen. Sedangkan rumah tangga miskin di Maluku yang menggunakan jamban sendiri/bersama hanya sekitar 63,42 persen. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga miskin belum memiliki kehidupan layak khususnya jika ditinjau dari perumahan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan menjadi tanggungjawab semua pihak baik masyarakat miskin itu sendiri, pemerintah, pengusaha dan semua elemen lainnya. Penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab atau determinan kemiskinan di Provinsi Maluku dan diantara faktor tersebut, faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi kemiskinan di Maluku. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Enam variabel yang secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku yakni Daya Beli Masyarakat (DB), Inflasi (Inf), pendidikan yang terdiri atas Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), kesehatan dalam hal ini Angka Harapan Hidup (AHH).
2. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kemiskinan di Maluku selama periode 2005-2011 adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Dengan demikian dapat disimpulkan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan di Maluku adalah faktor Kesehatan.
3. Karakteristik kemiskinan di Provinsi Maluku diantaranya adalah mayoritas penduduk miskin di Provinsi Maluku memiliki tingkat pendidikan yang rendah, lapangan pekerjaan penduduk miskin sebagian besar bergerak pada sektor informal.

6.2 Saran

1. Dengan melihat bahwa faktor yang berpengaruh paling dominan terhadap kemiskinan di Maluku adalah faktor kesehatan, maka sebaiknya pembangunan di Maluku pertam-tama

- harus diprioritaskan dalam hal pembangunan modal manusia seperti kesehatan dengan pendidikan.
2. Pembangunan infrastruktur juga dalah merupakan hal sangat urgen dalam pengentasan kemiskinan. Karena tanpa infrastruktur yang memadai pembangunan akan sulit untuk dilakukan meskipun dengan SDM yang kuat dan pintar.
 3. Penduduk miskin sebagian besar berusaha pada sektor pertanian. Oleh karena itu pembangunan pada sektor pertanian harus lebih mendapat perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Ayu Dian. 2009. *Profil Kemiskinan dan Determinan Kemiskinan Kabupaten Bogor (Study Kasus Desa Jogjong, Cisarua, Bogor)*, FE UI, Jakarta.
- Anggraini, Siska. 2007. *Pengaruh Zakat Terhadap Kemiskinan dan Pendapatan Masyarakat : Menggunakan Pendekatan SNSE 2003*, STIS, Jakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Azami, Profan Ali. 2009. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja dan Pendidikan terhadap Kemiskinan : Studi Kasus Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2007*, Jurnal Riset Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya.
- BPS, 1995. *Buku Panduan Penyusunan Indikator Sosial*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 1999. *Metodologi Penghitungan Penduduk Miskin Tingkat Kabupaten/ Kotamadya: Pendekatan dengan Data Susenas Kor*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 2005. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 2009. *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS Provinsi Maluku, 2008. *Analisis SE'06 Mengenai Ketenagakerjaan Di Provinsi Maluku*, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Ambon.
- BPS Provinsi Maluku, 2012. *Maluku Dalam Angka 2011*, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Ambon.
- Boediono, 2001. *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta.
- Daryanto, Arif dan Yundi Hafizrianda. 2010. *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah : Konsep dan Aplikasi*, IPB Press, Bogor.
- Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Girsang, Wardis. 2011. *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-pulau Kecil*, BPPF Unpatti, Ambon.
- Humantito, Ide Juang. 2009. *Analisis Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Indonesia*, FE UI, Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi Edisi Keenam*, Erlangga, Jakarta.

- Pamungkas , Catur Panggih. 2009. *Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan di Jawa Timur : Suatu Pendekatan Spasia*, Jurnal Riset Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya.
- Pattiwaellapia, M. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Maluku*, Universitas Pattimura, Ambon.
- Rosidi, Ali. 2005. *Metode Pengukuran Inflasi di Indonesia*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Suharso, Puguh. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis : Pendekatan Filosofi dan Praktis*, Indeks, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H. 2009. *Perekonomian Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Erlangga, Jakarta.
- Usman, Sinaga, B.M., Siregar, H. 2006. *Analisis Determinan Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal*. SOCA Universitas Udayana, Bali.